

BAB III

STRATEGI PENCAPAIAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) KOTA TEGAL TAHUN 2023

Dalam bab ini peneliti berusaha untuk menyajikan hasil temuan didapatkan selama proses penelitian dimulai dari observasi, pengumpulan data dan juga wawancara. Pada bab ini membahas strategi pencapaian layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintahan Daerah, hal ini muncul karena digitalisasi layanan seperti sebuah trend baru tetapi masih banyak pemerintahan daerah yang belum memperoleh pencapaian secara maksimal dan optimal. Dalam konteks ini Kota Tegal berhasil memperoleh pencapaian yang sangat baik dibandingkan daerah lainnya dimana perolehan nilai indeks SPBE di Kota Tegal tahun 2022 mendapatkan predikat baik dan tahun 2023 mendapatkan predikat sangat baik, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwasannya masih dijumpai kelemahan di beberapa aspek sehingga membutuhkan strategi dan evaluasi sebagai upaya perbaikan pada setiap tahunnya dengan harapan meningkatkan nilai indeks, oleh karena itu pada penelitian ini berusaha mengidentifikasi berbagai faktor yang dapat membuat SPBE berjalan secara optimal dan bagaimana strategi optimalisasi SPBE di Kota Tegal dengan menggunakan pendekatan SWOT. Dengan data yang telah dijabarkan, penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan fakta-fakta kondisi nyata atau real untuk kemudian mendapatkan faktor apa saja yang membuat SPBE dapat berjalan secara optimal dan bagaimana strategi optimalisasi dalam layanan SPBE Kota Tegal.

3.1 Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Tegal Tahun 2023

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa meskipun seiring dengan berjalannya waktu dari tahun ke tahun perolehan nilai indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Kota Tegal mengalami peningkatan hingga mendapatkan predikat sangat baik pada tahun 2023. Setelah berhasil mencapai peningkatan nilai indeks sebesar 0,66 pada tahun 2022 dan memperoleh predikat baik, Kota Tegal melanjutkan *trend* positif ini dengan peningkatan yang lebih besar pada tahun 2023. Peningkatan sebesar 1,62 ini mencerminkan kemajuan yang nyata, terutama dalam domain tata kelola, domain manajemen, dan domain layanan SPBE. Kemajuan ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan dan penguatan sistem yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tegal membuahkan hasil yang positif. Peningkatan nilai indeks ini juga membuktikan keberhasilan Kota Tegal dalam mengupayakan peningkatan kualitas layanan publik, pengelolaan yang lebih efektif, serta tata kelola yang lebih baik. Dengan capaian ini, Kota Tegal semakin dekat dengan tujuannya untuk menjadi kota yang mengedepankan efisiensi dan kemudahan akses layanan publik melalui teknologi, menjadikan *e-government* sebagai pilar utama dalam peningkatan kinerja pemerintahan.

Dalam setiap tahunnya Kota Tegal mempunyai strategi optimalisasi sistem pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan untuk menentukan skala prioritas yang ingin maupun yang masih memerlukan peningkatan, langkah ini sebagai bentuk target rencana Kota Tegal pada layanan SPBE pada tahun 2023 adalah memprioritaskan perluasan pemanfaatan tanda tangan elektronik sampai ke unit

terkecil seperti kelurahan. Seperti yang telah diketahui Kota Tegal sudah memiliki jaringan intra sampai ke kelurahan dimana menaungi 27 kelurahan, 4 kecamatan, dan 26 kantor dinas, karena pada dasarnya ruang wilayah Kota Tegal yang termasuk lingkup kecil dan kemampuan yang mumpuni dalam segi keuangan membuat Kota Tegal dapat membangun jaringan intra sampai ke tahap kelurahan. Pada aspek aksesibilitas internet dalam wilayah Kota Tegal sudah tersedia sehingga memudahkan akses internet bagi masyarakat. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa dalam indikator infrastruktur teknologi informasi Kota Tegal sudah cukup unggul. Selain itu perolehan hasil pemantauan dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik Kota Tegal pada tahun 2023 mendapatkan predikat sangat baik bilamana dibandingkan dengan pemerintahan daerah lainnya di Jawa Tengah. Berikut tabel perolehan nilai tingkat kematangan indikator di Kota Tegal :

Tabel 3.1
Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator Tahun 2023

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2023
1.	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah	3
2.	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah	5
3.	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	5
4.	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	5
5.	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	5
6.	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	5
7.	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	4
8.	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	5
9.	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	5
10.	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi	4

	SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah	
11.	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah	2
12.	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah	3
13.	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	3
14.	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	4
15.	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	3
16.	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	5
17.	Tingkat Kematangan Layanan Intra Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah	5
18.	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	2
19.	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah	4
20.	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	5
21.	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen SPBE	3
22.	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	3
23.	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	2
24.	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	3
25.	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	3
26.	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	2
27.	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	2
28.	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	2
29.	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	3
30.	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	3
31.	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	3
32.	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	5
33.	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34.	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35.	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	3
36.	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4
37.	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4
38.	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah	3
39.	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	1
40.	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	4
41.	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	4
42.	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan	4

	Publik	
43.	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	5
44.	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	4
45.	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	5
46.	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	5
47.	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	5

Sumber : Hasil Laporan Pemantauan dan Evaluasi SPBE di Kota Tegal (2023)

Tabel berikut ini menguraikan 15 indikator yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat kematangan tertinggi yaitu 5 yang juga merupakan skala tertinggi, yaitu: 7 poin untuk kebijakan SPBE, 2 poin untuk tata kelola SPBE, 1 poin untuk penyelenggaraan SPBE, 1 poin untuk pelayanan SPBE, 4 poin untuk pelayanan publik berbasis elektronik, dan 1 poin untuk pelayanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik. Dalam tabel tersebut, masing-masing indikator merepresentasikan aspek yang berbeda dari kebijakan SPBE, tata kelola internal, teknologi informasi dan komunikasi, dan strategi SPBE secara keseluruhan. Salah satu indikasi yang mendapat nilai sempurna dalam evaluasi dan monitoring sistem pemerintahan berbasis elektronik Kota Tegal tahun 2023 adalah Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Pusat/Pemerintah. Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pengembangan Aplikasi SPBE dan Pengelolaan Data Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data, Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra-Lembaga, Telah ditetapkan tingkat kematangan sebagai berikut: kebijakan internal pengelolaan keamanan informasi, kebijakan internal audit teknologi informasi dan komunikasi, layanan pusat data, layanan intra-lembaga pemerintah pusat dan daerah, kolaborasi penyelenggaraan SPBE, layanan perencanaan, layanan data terbuka, sektor layanan publik 1, sektor layanan publik 2, dan sektor layanan publik 3.

Salah satu indikator yang menonjol dalam evaluasi ini adalah Tingkat Kematangan Kebijakan Internal yaitu Kota Tegal berhasil mencapai nilai sempurna dalam berbagai aspek kebijakan internal, termasuk Peta Rencana SPBE, Manajemen Data, Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, dan Jaringan Intra Instansi. Hasil ini menunjukkan bahwa Kota Tegal memiliki landasan kebijakan yang kuat dan terstruktur dengan baik dalam implementasi SPBE. Selain kebijakan internal, tingkat kematangan layanan juga menjadi indikator penting yang dievaluasi.

Kota Tegal mencatat pencapaian yang sangat baik dalam layanan Pusat Data, layanan Intra Instansi Pemerintah Daerah, dan kolaborasi penerapan SPBE. Hal ini menunjukkan bahwa kota ini tidak hanya memiliki kebijakan yang baik tetapi juga mampu mengimplementasikannya dengan efektif dalam layanan sehari-hari. Tingkat kematangan yang tinggi pada layanan perencanaan, data terbuka, dan layanan publik di berbagai sektor semakin memperkuat posisi Kota Tegal sebagai salah satu daerah yang unggul dalam penerapan SPBE.

Dengan demikian hasil evaluasi SPBE Kota Tegal tahun 2023 menggambarkan kemajuan yang signifikan dalam penerapan teknologi informasi dalam pemerintahan. Pencapaian nilai sempurna pada banyak indikator, Kota Tegal berhasil menunjukkan komitmen yang kuat dalam mewujudkan pemerintahan yang efisien, transparan, dan berbasis teknologi. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengembangkan sistem pemerintahan yang modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan skor 7 untuk kebijakan SPBE, skor 2 untuk tata kelola SPBE, skor 1 untuk penyelenggaraan SPBE, skor 1 untuk pelayanan SPBE, skor 4 untuk pelayanan publik berbasis elektronik, dan skor 1 untuk pelayanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik, maka tingkat kematangan maksimal dapat dicapai dengan pencapaian 5 indikator yang tercantum dalam tabel berikut. Berbagai aspek strategi SPBE, meliputi kebijakan, tata kelola internal, serta teknologi informasi dan komunikasi direpresentasikan oleh indikator-indikator dalam tabel tersebut. Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Pusat/Pemerintah merupakan salah satu indikator yang memperoleh skor sempurna pada saat evaluasi dan monitoring sistem pemerintahan berbasis elektronik Kota Tegal tahun 2023. Sejauh mana Kebijakan Aplikasi dan Pengelolaan Data SPBE telah Terbangun Tingkat Pengembangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data, Tingkat Pengembangan Layanan Jejaring Kelembagaan Tim kami telah mengidentifikasi tingkat kematangan sebagai berikut: layanan pusat data, layanan intra kelembagaan untuk pemerintah pusat dan daerah, kolaborasi dalam implementasi SPBE, layanan perencanaan, layanan data terbuka, sektor layanan publik 1, sektor layanan publik 2, dan sektor layanan publik 3. Pencapaian ini menunjukkan bahwa Kota Tegal telah memiliki fondasi kebijakan yang matang dan terkoordinasi dengan baik dalam mengimplementasikan SPBE di berbagai sektor pemerintahan. Selain itu, Kota Tegal juga mencatat tingkat kematangan tinggi pada aspek inovasi proses bisnis SPBE dan berbagai layanan administratif lainnya.

Pada aspek layanan seperti penganggaran, keuangan, kepegawaian, kearsipan dinamis, dan akuntabilitas kinerja organisasi menggambarkan komitmen Kota Tegal untuk terus berinovasi dalam memperkuat proses bisnis dan layanan internalnya, yang berdampak langsung pada efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Keberhasilan ini juga terlihat dari tingkat kematangan layanan pada aspek pengaduan pelayanan publik dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) menunjukkan kemampuannya dalam mengelola layanan informasi hukum dan menanggapi keluhan masyarakat secara efektif. Pencapaian ini mencerminkan dedikasi Kota Tegal dalam meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas layanan publik, serta memastikan bahwa sistem dan kebijakan yang diterapkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Untuk mencapai tingkat kematangan yang maksimal, maka harus dicapai lima indikator sebagai berikut: skor kebijakan 7, skor tata kelola 2, skor pelaksanaan 1, skor layanan 1, skor layanan publik berbasis elektronik 4, dan skor layanan administrasi pemerintahan 1 untuk sistem berbasis elektronik. Indikator-indikator pada tabel tersebut mencakup berbagai komponen strategi SPBE, meliputi kebijakan, tata kelola internal, dan TI. Dalam rangka penelaahan dan pemantauan sistem pemerintahan berbasis elektronik Kota Tegal tahun 2023, beberapa indikator, antara lain Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Pusat/Pemerintah, memperoleh skor sempurna. Apakah kebijakan SPBE dalam pengelolaan aplikasi dan data telah dikembangkan secara memadai? Tingkat Layanan Infrastruktur Teknologi Informasi Jaringan Kelembagaan dan Pusat Data Layanan pusat data, layanan intrakelembagaan untuk instansi federal

dan negara bagian, layanan perencanaan, layanan data terbuka, sektor layanan publik 1, kerja sama penyelenggaraan SPBE, dan sektor layanan publik 3 merupakan tahapan kematangan yang telah diidentifikasi oleh kelompok kami.

Pencapaian signifikan dengan meraih tingkat kematangan skala 3 pada 13 indikator dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menunjukkan bahwa Kota Tegal telah membangun fondasi yang kuat dalam perencanaan dan pengembangan kebijakan SPBE, meskipun masih ada ruang untuk pengembangan lebih lanjut. Selain kebijakan, Kota Tegal juga menunjukkan kemajuan dalam penerapan manajemen dan keamanan SPBE. Tingkat kematangan skala 3 diraih dalam aspek Pembangunan Aplikasi SPBE, Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, dan Penerapan Manajemen Aset TIK. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun penerapan ini sudah berjalan dengan baik, namun masih perlu dilakukan perbaikan untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Begitu pun yang terlihat pada penerapan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam SPBE, serta pelaksanaan audit infrastruktur, aplikasi, dan keamanan SPBE yang telah mencapai tingkat kematangan yang cukup baik.

Tingkat kematangan skala 3 juga diraih oleh Kota Tegal dalam layanan pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan barang milik negara/daerah. Pencapaian ini menunjukkan bahwa Kota Tegal telah menerapkan standar dan prosedur yang memadai dalam pengelolaan aset dan pengadaan, meskipun masih memerlukan penyempurnaan untuk mencapai tingkat kematangan yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, capaian ini menggambarkan progres yang signifikan dalam upaya Kota Tegal untuk mengimplementasikan SPBE secara menyeluruh

dan berkelanjutan, serta menunjukkan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan tata kelola pemerintahan.

Perolehan tingkat kematangan skala 2 terbagi di 6 indikator dengan masing-masing terbagi dalam domain Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah, Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi, Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data, Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan, Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan, Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE. Pencapaian tingkat kematangan skala 2 pada enam indikator utama dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menunjukkan bahwa meskipun Kota Tegal telah memulai langkah-langkah awal yang penting dalam penerapan SPBE, namun masih memerlukan penguatan dan pengembangan lebih lanjut untuk mencapai standar yang lebih tinggi.

Selain itu, Kota Tegal juga mencatatkan tingkat kematangan skala 2 dalam penerapan manajemen, termasuk Manajemen Data dan Manajemen Pengetahuan. Ini menunjukkan bahwa upaya untuk mengelola data dan pengetahuan di tingkat instansi masih dalam tahap awal dan memerlukan perbaikan lebih lanjut agar dapat mendukung operasional yang lebih efisien dan terintegrasi. Di sisi lain, penerapan manajemen perubahan juga berada pada skala yang sama, menandakan bahwa proses adaptasi terhadap perubahan masih perlu didorong agar organisasi dapat lebih responsif terhadap dinamika yang terjadi.

Tingkat kematangan skala 2 juga dicapai dalam penerapan Manajemen Layanan SPBE. Ini mencerminkan bahwa meskipun ada beberapa kemajuan

dalam penyediaan layanan berbasis elektronik, namun layanan ini masih memerlukan peningkatan dari segi kualitas dan konsistensi. Kota Tegal perlu terus melakukan evaluasi dan penyesuaian dalam pengelolaan layanan SPBE agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pencapaian ini menggambarkan potensi besar Kota Tegal untuk berkembang lebih jauh dalam penerapan SPBE, sambil menyoroti area-area yang membutuhkan perhatian dan pengembangan lebih lanjut.

Perolehan tingkat kematangan skala 1 terbagi di 1 indikator yaitu Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah. Hasil ini mengindikasikan bahwa layanan pengawasan internal pemerintah di Kota Tegal masih dalam tahap paling awal pengembangan, dengan dasar-dasar yang mungkin sudah ada tetapi belum diimplementasikan secara efektif. Tingkat kematangan skala 1 ini menandakan bahwa meskipun kesadaran akan pentingnya layanan pengawasan internal telah ada, langkah-langkah konkret untuk mengoperasionalkan fungsi ini secara elektronik belum sepenuhnya diambil. Hal ini mencerminkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat infrastruktur, sistem, serta sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pengawasan internal, guna meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pemerintah daerah.

Sebagai langkah ke depan, penting bagi Kota Tegal untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada dalam pengembangan layanan pengawasan internal ini. Hal ini dapat mencakup kurangnya koordinasi antara unit pengawasan, terbatasnya akses terhadap teknologi yang mendukung, atau kurangnya pemahaman tentang standar dan *best practices* dalam pengawasan

berbasis elektronik. Mengatasi tantangan-tantangan ini akan menjadi kunci untuk mempercepat kemajuan menuju tingkat kematangan yang lebih tinggi.

Dalam meningkatkan skala kematangan layanan pengawasan internal, Kota Tegal perlu menyusun strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Hal ini bisa dimulai dengan memperkuat kerangka kebijakan, mengembangkan aplikasi dan alat pengawasan yang terintegrasi, serta meningkatkan kapasitas dan kompetensi para pegawai yang terlibat. Dengan komitmen dan upaya yang berkelanjutan, Kota Tegal dapat meningkatkan layanan pengawasan internalnya, sehingga dapat berkontribusi lebih besar terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efektif. Seperti yang disampaikan oleh Heru dalam wawancara sebagai tim pelaksana SPBE :

“Dari mulai perencanaan tertinggi itu Walikota yang pasti memiliki target 5 tahun yaitu RPJMD yang disusun oleh Bappeda memuat target yang ingin dicapai Walikota melalui indikator salah satunya SPBE merupakan prioritas yang terus ditingkatkan, selain itu penurunan kemiskinan dan pengangguran. Sebelum menyusun RPJMD terdapat RKPD yang mana merupakan rencana tahunan breakdown dari RPJMD sehingga dalam 5 tahun misalkan target SPBE ditahun terakhir kepemimpinan walikota target ingin 4 maka harus realistis 3 terlebih dahulu atau 2,5.” (Wawancara dengan Heru selaku tim pelaksana dari Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Tegal pada 26 April 2024).

Berdasarkan Pernyataan diatas bahwa Perencanaan pembangunan di Kota Tegal dimulai dari tingkat tertinggi, yaitu Walikota, yang memiliki target jangka panjang selama lima tahun. Target ini dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Dalam RPJMD ini, berbagai indikator kinerja diidentifikasi sebagai prioritas yang harus dicapai, termasuk peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Selain itu, Walikota juga menetapkan

target penurunan kemiskinan dan pengangguran sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebelum RPJMD disusun, terlebih dahulu dibuat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana tahunan dan pemecahan dari RPJMD. RKPD memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil setiap tahun selaras dengan tujuan jangka panjang yang tercantum dalam RPJMD. Misalnya, jika target kematangan SPBE di akhir masa kepemimpinan adalah mencapai skala 4, maka perencanaan yang realistis harus diterapkan terlebih dahulu dengan menetapkan target yang lebih rendah seperti skala 2,5 atau 3 di tahun-tahun awal. Pendekatan ini membantu menjaga kesinambungan dan fokus dalam mencapai target yang lebih besar.

Dengan perencanaan yang matang dan bertahap ini, Kota Tegal diharapkan dapat mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Peningkatan SPBE, penurunan kemiskinan, dan pengangguran menjadi fokus utama yang didukung oleh strategi perencanaan yang realistis dan terukur. Pendekatan ini tidak hanya memastikan bahwa target yang ditetapkan dapat dicapai secara bertahap, tetapi juga membantu Kota Tegal untuk tetap berada di jalur yang benar dalam mewujudkan visi jangka panjangnya.

Dalam pelaksanaan SPBE melalui tahapan secara runtut dan harus dituangkan secara berproses melalui koordinasi Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi tim pelaksana SPBE dengan berbagai pertimbangan anggaran yang ada. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Tegal melaksanakan aspek pengendalian yaitu pada saat akhir tahun dan akhir RPJMD 5

tahun, dengan mekanisme setiap tahun hasilnya dilaporkan dalam forum apa saja kelemahan yang ada untuk selanjutnya dilakukan perbaikan. Selain itu bukan hanya diakhir tahun saja melainkan setiap 3 bulan sekali atau triwulan untuk menjabarkan permasalahan yang ada, dalam 3 bulan itu juga organisasi perangkat daerah membuat laporan evaluasi hasil renja sehingga dari target itu yang mana SPBE termasuk dalam IKU yang mana target paling tinggi berada pada Dinas Komunikasi dan Informatika, tetapi dikarenakan SPBE mempunyai tenggat waktu yang hanya satu tahun maka dilaporkan diakhir tahun saja.

Bentuk mekanisme pemantauan dari pusat yaitu pada setiap tahun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melaksanakan penilaian dengan bentuk memberikan form untuk penilaian dari 4 domain yang diantaranya terdapat domain kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan dalam situs yang hanya dapat diakses oleh tim pelaksana SPBE untuk dapat diisi dan disertai data dukung yang dibutuhkan. Bappeda bertanggung jawab dalam menangani perencanaan yaitu data perencanaan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan SPBE telah berlangsung. Perencanaan SPBE di Bappeda sudah menggunakan sistem informasi dari Kemendagri yang bernama SPD atau Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sehingga untuk domain perencanaan yang didalamnya memuat penganggaran, perencanaan, kepegawaian, pengadaan barang jasa, kinerja pemerintahan. Selain itu perencanaan di Bappeda pelayanan penganggaran dibawah Badan Keuangan Daerah, pengadaan barang dan jasa di bagian BPJ (pengadaan barang jasa), layanan kepegawaian di BPKSDM, dan layanan publik perizinan di DPK. Dengan demikian dalam pelaksanaannya

membutuhkan koordinasi antar sektor organisasi perangkat daerah untuk dapat menilai sampai sejauh mana penggunaan SPBE. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Tegal untuk tahun 2023 telah memperoleh nilai indeks yang sudah sangat baik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang didalamnya terdapat tingkat kematangan dan memperoleh angka 4 dalam skala point 1 sampai dengan 5. Disisi lain tim pelaksana berada di bawah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tegal, hal ini disampaikan oleh Heru yang mengungkapkan bahwa :

“Implementasi jelas penggunaan berbasis elektronik kebetulan OPD yang memegang dan menangani adalah Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo” (Wawancara dengan Heru Bappeda Kota Tegal pada 26 April 2024)

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem berbasis elektronik di Kota Tegal telah berjalan sesuai rencana, dengan tanggung jawab penuh atas pengawasan ini berada di tangan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), sebuah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Koordinasi sejumlah kegiatan terkait pemerintahan yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi merupakan fungsi utama Diskominfo. Membangun dan memelihara infrastruktur digital serta mengawasi peluncuran SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di berbagai sektor merupakan bagian dari tanggung jawab ini. Dengan dukungan dari tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Diskominfo, sebagai penggerak utama, menjamin bahwa implementasi SPBE mengikuti semua kriteria. Berkat Diskominfo, pemerintah kota dapat mengefisienkan prosedur administratif, meningkatkan transparansi, dan meningkatkan efektivitas layanan publik melalui penggunaan teknologi. Staf

pemerintah dapat mengandalkan Diskominfo untuk pelatihan dan bantuan teknis dalam menggunakan sistem elektronik secara efektif..

Selain itu, Diskominfo terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan sistem berbasis elektronik di berbagai OPD lainnya. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa setiap unit kerja mengikuti perkembangan teknologi dan menerapkannya dengan efektif dalam kegiatan sehari-hari. Dengan implementasi yang terarah dan didukung oleh Diskominfo, Kota Tegal berupaya untuk semakin memperkuat tata kelola pemerintahan yang modern, responsif, dan berbasis teknologi, demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Tim pelaksana SPBE berada sepenuhnya pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tegal, hal ini terjadi dikarenakan untuk mengimplementasikan SPBE terdapat persyaratan diantaranya yang mengharuskan lulusan sarjana komputer maupun mempunyai sertifikat tentang komputer atau IT, oleh sebab itu diputuskan Diskominfo sebagai tim pelaksana karena memang pada saat itu yang memenuhi persyaratan tersebut hanya Dinas Komunikasi dan Informatika. Mekanisme penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terbagi menjadi penilaian mandiri dan penilaian langsung dari pusat. Penilaian mandiri dilakukan oleh tim pelaksana secara penuh pada lingkup pemerintah daerah yang diupload pada *website* Kemenpan RB disertai dengan data dukung yang dibutuhkan. Hal ini diungkapkan oleh Fahmi selaku tim pelaksana SPBE :

“Sebelumnya mereka melakukan sosialisasi penilaian kemudian setelah itu kita akan memasukkan bukti dukung masing-masing indikator sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Kemenpan setelah dibuka biasanya dibulan Mei atau Juni dengan aplikasi yang namanya tolpan SPBE (Pemantauan dan Evaluasi SPBE)” (Wawancara dengan Fahmi pegawai Diskominfo selaku tim pelaksana SPBE Kota Tegal pada 26 April 2024).

Berdasarkan pernyataan diatas dengan demikian Sebelum memulai proses penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), langkah awal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tegal adalah sosialisasi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang proses penilaian, kriteria yang harus dipenuhi, dan pentingnya peran setiap OPD dalam mendukung kesuksesan penilaian tersebut. Dengan adanya sosialisasi ini, setiap OPD diharapkan dapat mempersiapkan diri secara optimal dan menyusun strategi yang tepat untuk memenuhi standar yang ditetapkan.

Setelah sosialisasi dilakukan maka langkah berikutnya adalah pengumpulan bukti dukung dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Bukti dukung ini sangat penting karena menjadi dasar penilaian atas implementasi SPBE di lingkungan pemerintah daerah. Setiap OPD bertanggung jawab untuk memastikan bahwa bukti yang dikumpulkan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, mencakup berbagai aspek mulai dari kebijakan, aplikasi, hingga layanan yang berbasis elektronik. Pengumpulan bukti ini dilakukan dengan cermat dan sistematis, mengingat ketepatan dan kelengkapan data sangat berpengaruh terhadap hasil penilaian.

Proses pengumpulan dan verifikasi bukti dukung biasanya dimulai setelah aplikasi penilaian dibuka, yang biasanya terjadi pada bulan Mei atau Juni. Aplikasi yang digunakan untuk proses ini adalah aplikasi Tolpan SPBE, sebuah platform yang dirancang untuk memfasilitasi pemantauan dan evaluasi

implementasi SPBE di seluruh instansi pemerintah. Melalui aplikasi ini, setiap OPD dapat memasukkan bukti dukung yang relevan dengan indikator-indikator yang dinilai, serta memantau progres pengumpulan bukti secara real-time. Penggunaan aplikasi Tolpan SPBE juga memungkinkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penilaian, karena semua data yang dimasukkan dapat dilacak dan dianalisis dengan mudah.

Selama pada proses ini Diskominfo berperan aktif sebagai koordinator dan pengawas, memastikan bahwa semua OPD menjalankan tugasnya dengan baik. Diskominfo juga menyediakan bantuan teknis bagi OPD yang mungkin mengalami kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi Tolpan SPBE atau dalam mengumpulkan bukti dukung yang diperlukan. Kolaborasi dan komunikasi yang efektif antara Diskominfo dan OPD lainnya sangat penting untuk memastikan bahwa semua persyaratan penilaian terpenuhi dan bahwa Kota Tegal dapat meraih hasil yang optimal dalam penilaian SPBE. Sehingga melalui proses sosialisasi yang matang, pengumpulan bukti dukung yang sistematis, dan pemanfaatan aplikasi Tolpan SPBE, Kota Tegal dapat menilai dan memperkuat implementasi SPBE secara komprehensif. Hasil dari penilaian ini tidak hanya akan menentukan tingkat kematangan SPBE di kota ini, tetapi juga memberikan masukan berharga untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut, sehingga tata kelola pemerintahan berbasis elektronik di Kota Tegal dapat terus ditingkatkan demi memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Selain itu dalam pengisian form pada aplikasi tolpan SPBE oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang

mengoperasikan adalah Diskominfo Kota Tegal sebagai PIC namun dari organisasi perangkat daerah tetap mengadakan rapat sebagai bentuk koordinasi, karena dalam menyusun data dukung Kominfo sendiri yang dilakukan pada akhir bulan untuk berupaya semaksimal mungkin apa yang dapat ditingkatkan tetapi dengan kondisi kenyataan yang bisa kita pertanggungjawabkan di Kota Tegal seperti itu, dengan demikian jika dari point yang kita dapat sesuai dengan kondisi kenyataan di lapangan. Oleh karena itu hasil penilaian mandiri dan hasil evaluasi oleh pemerintah pusat lebih besar berpeluang memperoleh nilai indeks yang berbeda, hal ini terjadi karena dalam tahapan pelaksanaannya melalui pengecekan ulang oleh tim pusat yang bertugas memastikan apakah memenuhi keseluruhan data dukung yang dibutuhkan ataupun tidak. Ketika evaluasi dilakukan oleh pemerintah pusat, pendekatan lebih luas digunakan untuk memastikan bahwa SPBE memenuhi standar nasional dan memadai untuk kebutuhan pelayanan publik secara keseluruhan. Berikut gambar hasil penilaian mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Tegal :

Gambar 3.1
Hasil Evaluasi SPBE Mandiri Kota Tegal

Hasil Evaluasi SPBE 2023		
Nama Form	:	Evaluasi Penerapan SPBE 2023
Tahun	:	2023
Deskripsi	:	Evaluasi Penerapan SPBE 2023
Pemerintah Kota Tegal		
K/L/D	:	Pemerintah Kota
Indeks SPBE	:	3,95
Predikat SPBE	:	Sangat Baik
Nilai Indeks		
Domain Kebijakan SPBE	:	5
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	:	5
Domain Tata Kelola SPBE	:	3,7
Perencanaan Strategis SPBE	:	3
Teknologi Informasi dan Komunikasi	:	3,75
Penyelenggara SPBE	:	5
Domain Manajemen SPBE	:	2,45
Penerapan Manajemen SPBE	:	2,5
Audit TIK	:	2,33
Domain Layanan SPBE	:	4,34
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	:	3,9
Layanan Publik Berbasis Elektronik	:	5
Rekap Tingkat Kematangan		
No.	Indikator	Level
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	5
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	5
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	5
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	5
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	5
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	3
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	4
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	3
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	5
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	5
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	3
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	3
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	2
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	3
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	3
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	2
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	2
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	2
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	3
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	3
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	5
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	5
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	5
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	3
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	1
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	5
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	5
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	5
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	5
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	5
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	5
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	5

Sumber : Dokumen Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tegal (2023)

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwasannya Tim evaluasi dari pemerintah pusat akan meninjau ulang semua data pendukung, proses

administratif, dan kesesuaian dengan regulasi yang lebih ketat. Perbedaan ini tidak hanya mencakup validitas data, tetapi juga mengenai kapasitas dan kesiapan SPBE dalam menghadapi tantangan dan tuntutan yang lebih luas yang mungkin tidak terlihat dalam penilaian mandiri. Dengan demikian, perbedaan antara penilaian mandiri dan evaluasi pemerintah pusat mencerminkan sudut pandang yang berbeda dalam menilai kualitas dan kelayakan sebuah SPBE dalam melayani kepentingan negara secara menyeluruh. Hal ini disampaikan oleh Ika selaku tim pelaksana sistem pemerintahan berbasis elektronik :

“Asesor wawancara Kemenpan RB itu bekerjasama dengan banyak sekali perguruan tinggi, jadi lebih dari 100 asesor itu dosen-dosen dari semua perguruan tinggi. Kalo kemarin yang mewawancarai Kota Tegal itu dari Universitas Padjajaran kita mendapat catatan, yang tahapannya mereka sebelumnya memverifikasi dokumen yang udah kita upload lebih dulu, dari dokumen itu saat mereka ada keraguan maka ditanyakan kembali saat wawancara dan ternyata kita mendapat sekitar 15 indikator.” (Wawancara dengan Ika pegawai Diskominfo selaku tim pelaksana SPBE Kota Tegal pada 26 April 2024).

Berdasarkan pernyataan diatas menjelaskan bahwa Proses penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Tegal melibatkan tim asesor dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), yang bekerja sama dengan banyak perguruan tinggi di Indonesia. Lebih dari 100 asesor yang terlibat dalam proses ini adalah dosen-dosen dari berbagai perguruan tinggi terkemuka. Keberagaman dan keahlian asesor ini memastikan bahwa penilaian dilakukan secara objektif dan mendalam, memanfaatkan keahlian akademis dan praktis mereka dalam bidang teknologi informasi dan manajemen pemerintahan.

Dalam penilaian Kota Tegal, tim asesor yang ditunjuk berasal dari Universitas Padjajaran. Mereka memulai proses penilaian dengan memverifikasi dokumen-dokumen yang telah diunggah sebelumnya oleh Kota Tegal ke platform penilaian. Proses verifikasi ini penting untuk memastikan bahwa semua bukti dukung yang disampaikan sesuai dengan kriteria dan standar yang ditetapkan. Asesor memeriksa setiap detail dari dokumen yang telah diserahkan untuk menilai kesesuaian dan kualitas implementasi SPBE yang dilaporkan.

Selama tahap wawancara asesor dari Universitas Padjajaran mengeksplorasi lebih dalam jika terdapat keraguan atau ketidaksesuaian yang ditemukan dalam dokumen. Proses ini memungkinkan asesor untuk mendapatkan klarifikasi langsung dari pihak Kota Tegal, memastikan bahwa semua informasi yang disediakan akurat dan lengkap. Wawancara ini merupakan tahap penting dalam penilaian, karena memberikan kesempatan bagi tim penilai untuk mengonfirmasi dan memahami penerapan SPBE secara lebih rinci dari pihak yang terlibat langsung.

Hasil dari proses wawancara dan verifikasi ini adalah catatan yang mencakup sekitar 15 indikator yang dinilai dalam implementasi SPBE di Kota Tegal. Catatan ini mencerminkan area-area yang telah memenuhi standar dengan baik serta bidang-bidang yang masih memerlukan perbaikan. Pencapaian ini memberikan gambaran yang jelas tentang kekuatan dan kelemahan dalam sistem SPBE yang diterapkan, dan dapat menjadi dasar untuk perbaikan yang lebih lanjut.

Secara keseluruhan keterlibatan asesor dari berbagai perguruan tinggi dan proses penilaian yang komprehensif memastikan bahwa penilaian SPBE Kota Tegal dilakukan dengan cermat dan akurat. Proses ini tidak hanya menghasilkan penilaian yang objektif tetapi juga memberikan umpan balik yang konstruktif untuk pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik di masa depan. Dengan informasi yang diperoleh dari penilaian ini, Kota Tegal dapat merumuskan strategi perbaikan dan pengembangan yang lebih baik untuk mencapai tujuan SPBE dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian penilaian mandiri yang dilakukan akan ditanyakan dan dipertanggungjawabkan kembali oleh tim asesor dari pusat yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui wawancara sebelum perolehan hasil akhir nilai indeks. Kota Tegal sendiri mendapat pertanyaan salah satunya pada domain kebijakan yaitu terkait surat keputusan di pemerintah Kota Tegal yang mana surat keputusan terakhir keluar pada tahun 2021 dan pada tahun 2023 baru dilakukan perubahan. Selain itu juga terkait pada domain manajemen yaitu audit karena Kota Tegal yang memang baru melaksanakan audit, dimana terdapat 3 jenis audit yang diinstruksikan di SPBE diantaranya audit infrastruktur, audit aplikasi dan audit keamanan. Hal inilah yang kemudian ditanyakan ulang dalam wawancara bersama tim asesor karena yang telah diketahui Kota Tegal baru menyelesaikan 2 audit yaitu audit infrastruktur dan audit keamanan, sehingga ditanyakan mengapa manajemen audit aplikasi belum dijalankan. Hal ini yang menyebabkan dari 17 layanan terdapat 10 layanan yang dilakukan pemeriksaan kembali, karena hampir

beberapa layanan ini nilainya sudah cukup tinggi yaitu sampai di angka 4 dan 5 point, walaupun demikian masih dipertanyakan kembali khususnya dalam ditingkatkan optimalisasi mengapa masih terus berkembang.

Secara teori, layanan, tata kelola, dan kebijakan internal SPBE akan saling bersinergi untuk mendorong penerapan SPBE di Kota Tegal. Melihat banyaknya pro dan kontra, hasil evaluasi SPBE Kota Tegal mendukung klaim bahwa penerapan SPBE sudah sangat efektif. Manfaat penerapan SPBE Kota Tegal terletak pada: Penyelenggara SPBE, Layanan Administrasi Pemerintahan Online, Pelayanan Publik Online, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Perencanaan Strategis SPBE, dan Aspek Kebijakan Internal SPBE. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, Peta Rencana SPBE Instansi Pemerintah Pusat/Daerah, dan Kebijakan Pengelolaan Data SPBE merupakan bagian dari Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE. Di antara sekian banyak kebijakan internal yang turut mendukung keberhasilan penerapan SPBE di Kota Tegal adalah kebijakan terkait layanan data center, pengembangan aplikasi, jaringan intra instansi pemerintah pusat/daerah, sistem penghubung layanan, pengamanan informasi, audit teknologi informasi dan komunikasi, serta tim koordinasi SPBE pemerintah pusat/daerah. Jika dijabarkan berdasarkan indikator, berikut adalah hasil temuan Monitoring dan Evaluasi SPBE Kota Tegal Tahun 2023:

Gambar 3.2
Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator SPBE Kota Tegal

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator		
Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)		
No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2023
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	5
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	5
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	5
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	5
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	5
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	4
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	5
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	5
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	4
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	3
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	4
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	3
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	5
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pemerintah Daerah	5
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	2
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	5
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	3
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	3
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	2
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	3
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	3
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	2
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	2
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	2
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	3
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	3
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	3
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	5
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	3
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	3
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	1
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	4
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	4

42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	5
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	4
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	5
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	5
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	5

Sumber : Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE Kota Tegal (2023).

Dari data pada tabel di atas terlihat jelas bahwa Kota Tegal telah berupaya untuk mengkaji ulang ketentuan tata kelola SPBE secara internal dan melaksanakan rekomendasi yang diberikan selama kajian tersebut. Salah satu potensi kekuatan SPBE Kota Tegal adalah komponen perencanaan strategisnya, Inovasi Proses Bisnis SPBE. Yaitu titik dimana sistem menggabungkan inovasi yang dikaji dari proses bisnis. Aspek Penyelenggara SPBE menyoroti Instansi Pemerintah Pusat/Daerah, Kolaborasi Penyelenggara SPBE, Koordinator SPBE, dan Penyelenggara SPBE sebagai kekuatan dalam penyelenggaraan SPBE di Kota Tegal. Kekuatan penyelenggaraan SPBE di Kota Tegal dapat dilihat pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang meliputi layanan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, Kepegawaian, Kearsipan Dinamis, Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dan Kinerja Pegawai. Layanan administrasi tersebut seringkali telah dilakukan optimalisasi dan sudah memiliki kemampuan untuk terintegrasi dan berkolaborasi. Di antara sekian banyak keunggulan SPBE di Kota Tegal, yang menonjol adalah Pelayanan Publik Berbasis Elektronik, Pelayanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, Layanan Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum (JDIH), Sektor Pelayanan Publik 1, Sektor Pelayanan Publik 2, dan Sektor Pelayanan Publik 3. Kemampuan kolaborasi dan integrasi sudah ada di sebagian besar pelayanan publik tersebut, bahkan beberapa di antaranya sudah ditingkatkan. Di sisi lain, masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan di Kota Tegal, terutama pada kemampuan organisasi perangkat daerah dalam mengelola dan berkoordinasi lintas sektor. hal ini disampaikan oleh Amel selaku pegawai inspektorat Kota Tegal :

“Intinya kita di inspektorat belum pernah melakukan pemeriksaan SPBE, karena yang melaksanakan SPBE hanya tim dari Diskominfo tentang pelaksanaan pemeriksaan SPBE. Kalo data memang belum ada karena belum melaksanakan. Bisa ditanyakan lebih mendalam pada Diskominfo karena memang ada tim pengawasan SPBE yang anggota dari berbagai OPD karena kita tidak diikuti.” (Wawancara dengan Amel selaku pegawai Inspektorat Kota Tegal pada 29 April 2024).

Berdasarkan wawancara diatas menjelaskan bahwa pada saat ini Inspektorat di Kota Tegal belum pernah melaksanakan pemeriksaan terhadap Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Selama ini, pelaksanaan SPBE sepenuhnya ditangani oleh tim khusus yang dibentuk di bawah Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Tim ini bertanggung jawab untuk mengelola, memantau, dan mengevaluasi implementasi SPBE, tanpa keterlibatan langsung dari Inspektorat. Hal ini menjelaskan mengapa Inspektorat belum memiliki data atau laporan terkait pemeriksaan SPBE.

Sebagai otoritas yang fokus pada pengawasan dan audit internal pemerintahan, Inspektorat memang belum terlibat dalam pemeriksaan SPBE. Selama ini, Diskominfo telah menjadi pihak utama dalam menjalankan dan mengevaluasi sistem ini. Proses evaluasi SPBE dilaksanakan sepenuhnya oleh tim dari Diskominfo yang memiliki keahlian khusus dalam bidang teknologi informasi dan manajemen pemerintahan. Oleh karena itu, jika terdapat kebutuhan untuk data atau informasi lebih lanjut mengenai pemeriksaan SPBE, hal tersebut harus ditanyakan langsung kepada Diskominfo.

Diskominfo memiliki tim pengawasan SPBE yang melibatkan anggota dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tim ini bertugas untuk memastikan bahwa implementasi SPBE di setiap OPD berjalan sesuai dengan

rencana dan standar yang telah ditetapkan. Meskipun Inspektorat tidak diikutkan dalam proses ini, pengawasan internal SPBE dilakukan secara komprehensif oleh tim tersebut. Keberadaan tim pengawasan ini berfungsi untuk menjaga kualitas dan konsistensi penerapan SPBE di seluruh unit pemerintahan. Selanjutnya terkait pemeriksaan SPBE pun belum tersedia di Inspektorat karena belum adanya pelaksanaan pemeriksaan oleh Inspektorat. Informasi lebih mendalam mengenai status dan proses SPBE dapat diperoleh dari Diskominfo, sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab langsung dalam pelaksanaan dan pengawasan sistem ini. Diskominfo dapat memberikan rincian mengenai evaluasi, pengawasan, serta hasil dari penerapan SPBE yang telah dilakukan oleh tim mereka.

Namun meskipun Inspektorat belum terlibat dalam pemeriksaan SPBE, pengelolaan dan evaluasi sistem ini telah dilakukan oleh tim dari Diskominfo serta tim pengawasan SPBE yang terdiri dari berbagai OPD. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan data terkait, pihak-pihak yang berkepentingan harus menghubungi Diskominfo. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap aspek dari SPBE dipantau dan dikelola dengan baik sesuai dengan standar yang ditetapkan, meskipun Inspektorat belum terlibat langsung dalam proses tersebut.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa SPBE Kota Tegal memiliki beberapa kekurangan, meskipun memiliki nilai indeks yang tinggi dan predikat sangat baik. Salah satunya adalah kurangnya koordinasi antar organisasi perangkat daerah yang lintas sektor, yaitu inspektorat yang seharusnya mengawasi penyelenggaraan SPBE tetapi tidak menjadi bagian dari tim pelaksana maupun tim pengawas. Beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan dari SPBE Kota Tegal

adalah Perencanaan Strategis SPBE, Penyelenggara SPBE, TIK, Penyelenggaraan Pengelolaan SPBE, dan Audit TIK. Secara strategis, Kota Tegal masih kekurangan Perencanaan Strategis SPBE yang mengatur Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Secara teknologi, Kota Tegal juga kekurangan TIK yang mengatur Pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Terakhir, Penyelenggara SPBE yang mengatur Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Kerjasama Penyelenggaraan SPBE masih kurang. Terakhir, salah satu aspek positif dari penyelenggaraan SPBE di Kota Tegal adalah belum adanya implementasi pengelolaan SPBE yang nyata. Namun, audit pada Aspek Audit TIK belum dilakukan oleh auditor eksternal yang memiliki sertifikasi di bidang keamanan, sistem informasi, atau infrastruktur. Selain itu, Pemerintah Daerah Kota Tegal dapat menyempurnakan Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang saat ini telah diatur secara internal dan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik agar lebih sesuai dengan tren kolaborasi dan integrasi. Demikian pula, organisasi yang telah mencapai tingkat kematangan kolaborasi dan integrasi tertentu dapat memperoleh manfaat dari pengoptimalan lebih lanjut.. Hal ini disampaikan oleh Eko selaku pegawai Inspektorat Kota Tegal:

“Sumber daya manusia untuk SPBE jelas banyak, tetapi untuk di inspektorat sendiri tidak ada yang khusus IT. Sedangkan sisi finansial ya kurang makanya kami belum bisa membangun aplikasi hanya bisa mereplikasi yaitu SIMWAS oleh karena itu kita meminta bantuan kepada provinsi yang tidak bisa dipungkiri membutuhkan dana yang sangat besar pastinya.” (Wawancara dengan Eko selaku pegawai Inspektorat Kota Tegal pada 29 April 2024).

Dari pernyataan diatas menjelaskan bahwa Sumber daya manusia untuk implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Tegal tersedia dalam jumlah yang cukup, terutama di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), yang secara khusus menangani aspek teknologi informasi dan komunikasi. Diskominfo memiliki tim yang terampil dalam pengelolaan dan pengembangan SPBE, dengan berbagai keahlian teknis yang dibutuhkan untuk memastikan sistem berjalan dengan optimal. Namun, kondisi ini berbeda dengan situasi di Inspektorat, di mana tidak terdapat staf khusus yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi.

Di sisi lain, Inspektorat belum memiliki personel yang khusus menangani aspek IT. Hal ini menjadi kendala karena spesialisasi di bidang teknologi informasi sangat diperlukan untuk menangani dan mengawasi implementasi SPBE secara efektif. Tanpa kehadiran staf IT yang khusus, Inspektorat mengalami keterbatasan dalam melakukan pemeriksaan dan evaluasi yang mendalam terhadap sistem berbasis elektronik, sehingga tidak dapat berfungsi secara maksimal dalam konteks pengawasan SPBE.

Dari segi finansial, Inspektorat juga menghadapi tantangan yang signifikan. Anggaran yang tersedia saat ini tidak mencukupi untuk membangun aplikasi atau sistem SPBE yang baru. Akibatnya, Inspektorat hanya dapat mereplikasi aplikasi yang sudah ada, seperti Sistem Pengawasan Internal (SIMWAS), tanpa mampu melakukan pengembangan yang lebih canggih atau memperkenalkan inovasi baru. Keterbatasan dana ini menghambat kemampuan

untuk melakukan pembaruan atau peningkatan sistem sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang.

Mengatasi masalah keterbatasan finansial dan teknis ini, Inspektorat telah meminta bantuan kepada pemerintah provinsi. Dukungan dari provinsi menjadi krusial karena membangun dan mengembangkan sistem berbasis elektronik memerlukan investasi yang signifikan. Dana yang besar diperlukan untuk mengembangkan aplikasi yang sesuai dengan standar dan kebutuhan pengawasan yang lebih komprehensif. Bantuan provinsi diharapkan dapat mengatasi kekurangan anggaran dan mempercepat proses pengembangan sistem yang lebih baik. Meskipun terdapat banyak sumber daya manusia yang kompeten di Diskominfo untuk SPBE, Inspektorat menghadapi tantangan besar dalam hal keahlian IT dan keterbatasan finansial. Dengan adanya bantuan dari pemerintah provinsi, diharapkan dapat mengatasi kendala tersebut dan memungkinkan Inspektorat untuk memperluas kapasitasnya dalam pengawasan dan evaluasi SPBE. Pendekatan ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa sistem pengawasan dapat berfungsi secara efektif dan mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan efisien.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kelemahan yang membuat sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kota Tegal selain dari sumber daya manusia yang kurang mumpuni karena masih kurangnya pegawai dengan latar belakang lulusan teknologi informasi (IT) juga pada sisi sumber daya finansial, dengan di optimalisasikannya SIMWAS sebagai bentuk upaya peningkatan pada indikator manajemen, namun tidak dapat dipungkiri bahwa Kota Tegal masih

tidak siap dalam tata kelola pemerintahan. Hal ini terbukti pada aspek koordinasi antar lintas organisasi perangkat daerah dalam upaya menindak lanjuti hal apa saja yang masih memerlukan perbaikan atas kelemahan yang ada, sehingga dalam hal ini bukan hanya *political will* saja melainkan diperlukan juga *political action*. Namun pada faktanya yang terjadi di lapangan peran Walikota selaku kepala daerah sekaligus ketua tim koordinasi pelaksana SPBE hanya bertindak mengarahkan namun tidak ada tindakan konkret yang dilakukan oleh Walikota. Hal inilah yang menyebabkan masih minimnya koordinasi organisasi perangkat daerah dalam peran pemantauan dan pengawasan SPBE karena sepenuhnya dijalankan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tegal, selain itu rapat koordinasi dilakukan hanya bilamana memerlukan data dukung yang dibutuhkan saja. Hal ini disampaikan oleh Fahmi selaku pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tegal :

“Dari Pak Wali sangat mendukung, kemarin kita paparan dengan Pak Wali beliau mendukung “mas mana datanya? Coba naikin kembali lagi ukuran menjadi target, tetapi kita kalo akan mengerjakan akan serius seperti SIMWAS dikerjakan dengan betul-betul akan kepahe makanya koordinasi dengan inspektorat jalan”. (Wawancara dengan Fahmi selaku pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tegal pada 29 April 2024).

Dari pernyataan diatas menjelaskan bahwa Dukungan dari Wali Kota terhadap implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Tegal sangat kuat dan jelas. Dalam sebuah kesempatan paparan terbaru Wali Kota menunjukkan komitmennya yang tinggi dengan menanyakan secara langsung tentang data dan kemajuan terkait SPBE. Beliau menekankan pentingnya untuk meningkatkan ukuran target yang telah ditetapkan, menunjukkan bahwa beliau sangat peduli dengan pencapaian yang optimal dan berkualitas. Dukungan ini

mencerminkan tekad beliau untuk memastikan bahwa semua inisiatif SPBE mendapatkan perhatian yang serius dan ditangani dengan baik.

Wali Kota Tegal juga menyatakan bahwa jika proyek SPBE akan dilaksanakan, maka harus dilakukan dengan keseriusan yang sama seperti dalam pengembangan aplikasi Sistem Pengawasan Internal (SIMWAS). Beliau menekankan pentingnya mengerjakan proyek ini dengan benar dan sesuai standar, sehingga hasilnya dapat digunakan secara efektif. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Pak Wali menginginkan hasil yang tidak hanya memenuhi ekspektasi tetapi juga bermanfaat dalam jangka panjang untuk tata kelola pemerintahan. Sebagai tindak lanjut dari arahan tersebut, koordinasi dengan Inspektorat menjadi langkah penting yang diambil. Pak Wali menggarisbawahi bahwa kerja sama yang solid dengan Inspektorat akan memastikan bahwa pelaksanaan SPBE dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang direncanakan. Koordinasi ini diharapkan dapat memfasilitasi penyelesaian masalah dan meningkatkan kualitas pengawasan serta evaluasi terhadap implementasi SPBE di seluruh unit pemerintahan.

Dengan adanya dukungan penuh dari Wali Kota, tim yang terlibat dalam pelaksanaan SPBE merasa termotivasi untuk meningkatkan kinerja dan memastikan pencapaian target yang telah ditetapkan. Dukungan ini juga menciptakan dorongan untuk bekerja lebih keras dan memastikan bahwa setiap aspek dari SPBE dikerjakan dengan benar. Pengalaman dari proyek SIMWAS menjadi acuan penting, dimana proses kerja yang serius dan profesional diharapkan dapat diulang untuk SPBE. Dukungan dan arahan Wali Kota Tegal

memberikan dorongan yang signifikan untuk meningkatkan implementasi SPBE di Kota Tegal. Dengan komitmen untuk meningkatkan ukuran target dan memastikan bahwa proyek dikerjakan dengan serius, serta koordinasi yang efektif dengan Inspektorat, diharapkan bahwa SPBE dapat berkembang dengan baik dan memenuhi standar yang diharapkan. Pendekatan ini menunjukkan kepemimpinan yang proaktif dan berorientasi pada hasil yang berkualitas.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pentingnya koordinasi antar lintas organisasi perangkat daerah dalam menindaklanjuti perbaikan atas kelemahan dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik sangat krusial untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan publik. Dalam konteks ini, koordinasi yang baik memastikan bahwa semua stakeholder terlibat secara aktif dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang ada. Misalnya, ketika terdapat kelemahan dalam implementasi SPBE, seperti kurangnya integrasi antar sistem atau kepatuhan terhadap regulasi yang rendah, koordinasi yang efektif memungkinkan organisasi terkait untuk saling mendukung dalam mengatasi tantangan tersebut. Namun yang seringkali terjadi adalah peran Walikota sebagai kepala daerah dan ketua tim koordinasi dalam SPBE terkadang hanya sebatas mengarahkan tanpa melakukan tindakan konkret.

Meskipun pentingnya *political will* atau keinginan politik untuk melakukan perubahan sudah ada, namun tanpa adanya *political action* atau tindakan konkret, implementasi perbaikan yang dibutuhkan tidak akan terwujud secara maksimal. Hal ini dapat menghambat kemajuan dalam memperbaiki kelemahan yang ada dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik, karena

koordinasi yang hanya sebatas pada arahan tanpa tindakan nyata akan sulit menghasilkan perubahan yang signifikan dalam praktiknya. Oleh karena itu, penting bagi Walikota dan tim koordinasi untuk tidak hanya berbicara tentang perbaikan, tetapi juga mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa rekomendasi dan perbaikan yang diperlukan dapat diimplementasikan dengan efektif dan efisien. Dengan demikian sejauh ini Kota Tegal telah berusaha semaksimal mungkin dalam memperbaiki dan meningkatkan nilai indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik, dengan dibuktikan dengan perolehan hasil pemantauan dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik selama kurun waktu 5 tahun berturut-turut mendapatkan kenaikan yang signifikan, bukan hanya itu pada tahun 2023 ini Kota Tegal mendapatkan nilai indeks pemantauan dan evaluasi SPBE berhasil memperoleh predikat sangat baik dengan kematangan skala terendah hanya pada satu aspek yaitu pada sisi Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah. Dengan langkah kongkret sebagai upaya solusi atas penyelesaian untuk memperbaiki kekurangan yang ada yaitu mengupayakan implementasi SIMWAS pada lingkup inspektorat, dengan harapan dapat mencapai predikat unggul dalam hasil evaluasi dan pemantauan SPBE pada tahun 2024 mendatang.

3.2 Pencapaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Di Kota Tegal Tahun 2023

Dalam era digital yang semakin maju, pemerintah di seluruh dunia sedang bertransisi menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik, atau *e-government*. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas

dalam pelayanan publik serta memperkuat partisipasi warga dalam proses pemerintahan. Proses ini dimulai dari visi dan komitmen kuat pemerintah pusat. Pemimpin negara, seperti presiden atau perdana menteri, memainkan peran penting dalam mengarahkan dan mendorong transformasi digital ini. Dengan menetapkan kebijakan strategis dan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan, mereka memberikan landasan bagi pengembangan *e-government*.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melaksanakan tugas dan tanggung jawab membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara melalui penyelenggaraan urusan yang berkaitan dengan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Sementara itu, Dinas Komunikasi dan Informatika bersama lintas organisasi perangkat daerah bertugas mengembangkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung *e-government*. Dinas ini juga melaksanakan tugas dan tanggung jawab tim pelaksana sistem pemerintahan berbasis elektronik di daerah. Tugas mereka adalah menetapkan standar dan ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap orang dapat mengakses internet. Perlindungan data pemerintah dan masyarakat dari ancaman dan serangan siber menjadi tanggung jawab Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 2.A Tahun 2022 mengatur kebijakan kota untuk beralih ke sistem pemerintahan elektronik. Kebijakan ini pada dasarnya mendukung rencana reformasi birokrasi. Salah satu tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Wali Kota ini. Kebijakan Pemerintah Kota Tegal untuk memanfaatkan teknologi informasi bagi

pelayanan publik dan pengembangan sumber daya manusia ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan ini. Mengingat Kota Tegal memerlukan waktu hingga tahun 2022 untuk melakukan penyesuaian pasca terbitnya Peraturan Wali Kota tentang SPBE, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah sangat terkait dengan pengembangan pemanfaatan teknologi. Berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan Sistem Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, diharapkan penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Tegal akan sangat berhasil pada tahun 2023. Hasil pemantauan dan evaluasi Sistem Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami kenaikan dan penurunan. Namun pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 terjadi peningkatan yang cukup signifikan, yaitu dari cukup meningkat menjadi baik, kemudian sangat baik. Hal ini berdasarkan data yang terkumpul selama 5 tahun terakhir. Presentase indeks kenaikan terjadi pada tahun 2019 menuju tahun 2020 yaitu mengalami kenaikan sebesar 0,46. Namun terjadi penurunan presentase indeks kembali pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2020 menuju tahun 2021 sebesar 0,61. Akan tetapi terjadi peningkatan nilai indeks kembali pada tahun 2022 sebesar 0,66 dengan perolehan predikat baik, begitu juga pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan yang signifikan sebesar 1.62.

Target rencana Kota Tegal pada layanan SPBE pada tahun 2023 adalah memprioritaskan perluasan pemanfaatan tanda tangan elektronik sampai ke unit terkecil seperti kelurahan. Dapat dilihat dari Kota Tegal yang sudah memiliki jaringan intra sampai ke kelurahan dimana menaungi 27 kelurahan, 4 kecamatan,

dan 26 kantor dinas, karena pada dasarnya ruang wilayah Kota Tegal yang termasuk kecil dan kemampuan yang mumpuni dalam segi keuangan membuat kota tegal dapat membangun jaringan intra yang mampu menjangkau lintas sektoral organisasi perangkat daerah sampai ke tahap kelurahan hingga pada puskesmas. Pada aspek aksesibilitas internet dalam wilayah Kota Tegal sudah tersedia 4G sehingga memudahkan akses internet bagi masyarakat yang terbukti sudah tersedianya akses internet pada ruang terbuka publik seperti pada taman alun-alun. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa dalam indikator infrastruktur teknologi informasi Kota Tegal sudah cukup unggul. Namun demikian Pemerintah Kota Tegal tidak puas sampai disini sehingga berupaya untuk terus meningkatkan nilai indeks pada sistem pemerintahan berbasis elektronik di tahun 2024 untuk memperoleh predikat unggul dengan terus melakukan perbaikan dan rencana strategis apa saja domain dalam SPBE yang masih menjadi kekhawatiran dan fokus untuk terus ditingkatkan seperti pada domain manajemen dan audit.

Dukungan dari komponen pimpinan menjadi krusial dalam mempertimbangkan dukungan. Seluruh proses *e-government* bergantung pada tekad politik pimpinan untuk membangun *e-government*. Artinya, para pemimpin harus menjadi pemikir hebat dalam hal ide, tetapi mereka juga harus hebat dalam menginspirasi orang lain untuk mewujudkan ide-ide tersebut. Keberhasilan sejumlah program pembangunan dan *e-government* bergantung pada adanya kemauan politik. Wali Kota Tegal sepenuhnya mendukung rencana penggunaan EBS untuk operasional dan pengawasan pemerintahan. Kota Tegal, khususnya organisasi perangkat daerah, memiliki atau memiliki akses terhadap tenaga kerja

yang memiliki kualifikasi, pengalaman, dan komitmen yang memadai terhadap tugasnya, khususnya di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tegal. Hal ini sesuai dengan kesiapan unit dan sumber daya manusia yang termasuk dalam indikator kekuatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Salah satu indikasinya adalah adanya bagian *e-government*, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tegal, yang bertugas untuk mengawasi seluruh proses implementasi SPBE.

Selain itu, setiap organisasi perangkat daerah memiliki unit lintas sektor yang membantu tim pelaksana. Membangun gagasan ini dengan pola pikir interdisipliner membutuhkan komitmen berbagai sumber daya (termasuk manusia, uang, waktu, dan data) dari semua tingkat pemerintahan. Meskipun tidak semua organisasi perangkat daerah memiliki anggota staf dengan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan teknologi digital, hal ini sekarang tidak menjadi masalah karena Dinas Komunikasi dan Informasi siap untuk berkoordinasi dan memberikan bantuan penuh.

Lebih jauh, kerangka *e-government* diakui sebagai komponen penting bagi negara untuk mewujudkan visi dan tujuannya, karenanya layak mendapat perhatian utama sementara komponen penting lainnya ditangani. Di sini, peta rencana SPBE disiapkan setiap tahun dengan tujuan untuk berkonsentrasi pada tujuan tahun tersebut. Karena nilai indeks domain manajemen agak rendah dibandingkan dengan tiga domain lainnya, SPBE Kota Tegal akan memprioritaskan peningkatannya pada tahun 2024. Resistensi kemungkinan akan minimal jika semua orang menyetujui kerangka tersebut.

Kemudian, untuk mendorong pertumbuhan *e-government*, sejumlah infrastruktur tambahan dan suprastruktur dibangun. Terbukti dengan hampir meratanya jaringan internet Kota Tegal di seluruh wilayah kota, mulai dari kecamatan dan puskesmas hingga area publik seperti taman alun-alun dan di seluruh organisasi perangkat daerah. Selain itu, realisasi sosialisasi konsep *e-government* kepada seluruh warga masyarakat dan khususnya birokrat melalui berbagai kampanye empati harus dilakukan secara merata, berkesinambungan, konsisten, dan menyeluruh. Sebagai bagian dari proses tahunan pelaksanaan dan pengawasan SPBE, ada rapat yang dihadiri oleh tim pelaksana SPBE untuk membahas sasaran tahun berjalan dan nilai indeks mana yang masih menjadi prioritas utama untuk ditingkatkan.

Kendati demikian, masih terdapat beberapa kekurangan yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan SPBE. Salah satu permasalahannya adalah belum meratanya penyaluran sumber daya manusia di masing-masing perangkat daerah dalam mengelola teknologi digital. Berbagai sarana dan prasarana telah dipersiapkan, termasuk memastikan setiap pegawai di perangkat daerah memiliki akses komputer. Koneksi internet sudah memadai, namun domain pengelolaan SPBE masih memerlukan kemampuan yang lebih. Oleh karena itu, tim pelaksana SPBE dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tegal terus berupaya untuk meningkatkannya. Berbagai kelebihan dan kekurangan SPBE saat ini memunculkan berbagai peluang yang dapat dijadikan target perbaikan.

Salah satu peluang tersebut adalah tersedianya sumber daya yang memadai untuk melaksanakan berbagai inisiatif *e-government*, khususnya yang berkaitan

dengan sumber daya keuangan. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Tegal terbuka terhadap usulan penerbitan usulan anggaran pengelolaan SPBE. Alhasil, dana yang tersedia hingga saat ini cukup memadai, namun terkadang masih ada kebutuhan yang belum terpenuhi karena harus didistribusikan secara merata ke seluruh perangkat daerah di bawah Dinas Komunikasi dan Informatika. Dengan infrastruktur TI yang memadai, ada peluang besar untuk memanfaatkan separuh dari bahan rahasia keberhasilan peluncuran *e-government*. Berikutnya, kita memiliki ketersediaan dan kesiapan sumber daya manusia dengan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan untuk menjalankan *e-government* dengan cara yang memaksimalkan keuntungan yang diharapkan. Tahun lalu, banyak jaringan organisasi perangkat daerah yang disusupi, yang menunjukkan bahwa situs web Pemerintah Kota dan organisasi perangkat daerah merupakan sasaran empuk bagi para peretas dan dengan demikian terus menjadi ancaman bagi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Melihat hal ini, Pemerintah Kota Tegal tidak membuang waktu untuk mengambil tindakan; pada bulan Januari atau Februari, misalnya, Kantor Komunikasi dan Informasi menyelenggarakan pelatihan keamanan siber bagi anggota staf semua organisasi perangkat daerah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa situs web BPKSDM akan terlindungi dari setiap potensi serangan.

Strategi pengembangan *e-government* disusun dengan pendekatan perencanaan strategis yang bersifat luwes dan dinamis. Dengan pendekatan perencanaan strategis maka partisipasi *stakeholders* (masyarakat dan perguruan tinggi sebagai tim pengawas dan penilai) diperlukan untuk meningkatkan rencana

pengembangan ini. Dalam hal ini sebagai bentuk strategi optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dapat dilakukan dengan cara diantaranya :

- a. Pembangunan infrastruktur dan akses jaringan komunikasi data yang memadai, yaitu: pengadaan sarana-prasarana pengembangan infrastruktur akses komunikasi data yang handal, pemberdayaan sumber daya atau kerjasama dengan swasta/masyarakat dalam penyediaan akses komunikasi data yang mudah, nyaman, dan dengan biaya terjangkau.
- b. Pengembangan SDM untuk mengelola *e-government*, yaitu: pelatihan SDM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang pengoperasian *e-government*, pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan profesionalitas tenaga fungsional teknologi informasi dan komunikasi, pemberian kepastian karier dan kesejahteraan yang memadai bagi SDM bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- c. Pengembangan perangkat-perangkat lunak yang diperlukan, meliputi: pemanfaatan koordinasi antara instansi dan internal instansi dalam pembuatan perangkat lunak yang diperlukan untuk mendukung *e-government* secara umum, pemantapan koordinasi antarinstansi dan internal instansi dalam pembuatan perangkat lunak unggulan, pemantapan legalitas perangkat lunak, pemberdayaan atau kerjasama dengan berbagai pihak lain.
- d. Pengembangan basis data (*databases*) dan basis pengetahuan (*knowledge bases*) pendukung *e-government*, yaitu pemantapan koordinasi antarinstansi dan internal instansi dalam pembangunan basis data, pembangunan basis pengetahuan yang diperlukan untuk pengoperasian dan pengembangan

berkelanjutan *e-government*, pemberdayaan atau kerjasama dengan berbagai pihak dalam pembangunan basis data dan basis pengetahuan.

- e. Pengembangan organisasi dan tata kerja yang mendukung *e-government*, yaitu: pembentukan/penunjukan satu unit kerja atau instansi yang bertugas mengkoordinasikan pembangunan, pemeliharaan, pengendalian, pembentukan unit kerja (di setiap instansi) yang bertugas mengelola *e-government*, dan pemantapan koordinasi antarinstansi.
- f. Pembaharuan aturan atau regulasi dalam hal ini peraturan perundangan dan kebijakan yang diperlakukan untuk mendukung *e-government* khususnya di Kota Tegal yang relevan.
- g. Pemeliharaan dan perawatan perangkat lunak dan keras/jaringan, yaitu: pemeliharaan dan perawatan perangkat keras/jaringan, perangkat lunak, pengelolaan portal internet (*one-stop service websites*), pemeliharaan basis data dan basis pengetahuan.
- h. Pengembangan dan koordinasi layanan informasi yang mampu mendukung terwujudnya masyarakat yang kompetitif serta menarik investasi ke daerah yaitu: pengembangan dan koordinasi layanan informasi guna memenuhi kebutuhan informasi yang mampu mendukung terwujudnya masyarakat yang kompetitif, pengembangan teknologi informasi terhadap layanan informasi yang telah terkoordinasi, pengembangan promosi potensi investasi guna mewujudkan masyarakat yang kompetitif serta menarik investasi.

Dengan demikian dari adanya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai bentuk implementasi *e-government* membawa berbagai kebermanfaatan

seperti layanan publik menjadi lebih cepat dan efisien, mengurangi birokrasi yang berbelit-belit. Transparansi meningkat karena informasi publik tersedia secara online, dan memungkinkan warga untuk mengawasi dan memberikan masukan. Disisi lain partisipasi warga dalam pemerintahan juga akan meningkat melalui platform digital yang memfasilitasi komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Dalam jangka panjang, *e-government* diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat lebih baik melayani kebutuhan dan aspirasi warga negara di era digital ini.

3.3 Strategi Pencapaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Kota Tegal Tahun 2023

Berdasarkan temuan di lapangan hasil evaluasi dan pemantauan SPBE di Kota Tegal mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2022 yaitu dari perolehan nilai indeks 3,05 dengan predikat baik dan selanjutnya tahun 2023 mendapatkan nilai indeks 3,76 dengan predikat sangat baik. Seperti yang telah diketahui bahwa SPBE merupakan sebuah tolak ukur dalam pencapaian e-government dalam pemerintahan daerah dan tentunya dibuktikan dengan hasil nilai pada setiap tahunnya. Namun dalam faktanya tidak ada pengukuran standart yang dapat menentukan sebuah evaluasi dan pemantauan SPBE dapat mencapai nilai indeks yang bersifat sudah optimal maupun belum optimal. Hal ini dibuktikan pada setiap tahunnya memiliki kriteria penilaian yang berbeda sehingga ini akan berkorelasi langsung pada perolehan yang membuat nilai indeks pada setiap tahun dapat berubah, oleh sebab itu yang membuat hasil penilaian mandiri dapat berubah dengan hasil evaluasi dan pemantauan SPBE dari pusat. Dengan

demikian SPBE merupakan alat ukur untuk menilai tingkat kematangan yang memang itu adalah sebuah esensi yang terkandung dalam SPBE. Namun dalam penilaiannya tidak ada kualifikasi yang menentukan seberapa optimal SBPE pada suatu daerah yang telah dijalankan. Oleh karena itu ukuran tingkat kematangan yang tinggi dalam SPBE bergantung pada kesanggupan dan terpenuhinya suatu daerah dalam menyusun dan mengumpulkan data dukung yang dibutuhkan.

3.3.1 Dukungan atau *Support*

- a. Walikota Tegal telah memberikan dukungan secara penuh dalam implementasi dan pengawasan SPBE, dibuktikan dari pra penyusunan SPBE melalui tahap rapat untuk menentukan target mana yang akan menjadi fokus ditahun tersebut.

Dibuktikan dengan Dalam meningkatkan skala kematangan layanan pengawasan internal, Kota Tegal perlu menyusun strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Hal ni bisa dimulai dengan memperkuat kerangka kebijakan, mengembangkan aplikasi dan alat pengawasan yang terintegrasi, serta meningkatkan kapasitas dan kompetensi para pegawai yang terlibat. Dengan komitmen dan upaya yang berkelanjutan, Kota Tegal dapat meningkatkan layanan pengawasan internalnya, sehingga dapat berkontribusi lebih besar terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efektif. Seperti yang disampaikan oleh Heru dalam wawanacara sebagai tim pelaksana SPBE :

“Dari mulai perencanaan tertinggi itu Walikota yang pasti memiliki target 5 tahun yaitu RPJMD yang disusun oleh Bappeda memuat target yang ingin dicapai Walikota melalui indikator salah satunya SPBE merupakan prioritas yang terus ditingkatkan, selain itu

penurunan kemiskinan dan pengangguran. Sebelum menyusun RPJMD terdapat RKPD yang mana merupakan rencana tahunan breakdown dari RPJMD sehingga dalam 5 tahun misalkan target SPBE ditahun terakhir kepemimpinan walikota target ingin 4 maka harus realistis 3 terlebih dahulu atau 2,5.” (Wawancara dengan Heru selaku tim pelaksana dari Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Tegal pada 26 April 2024).

Berdasarkan Pernyataan diatas bahwa Perencanaan pembangunan di Kota Tegal dimulai dari tingkat tertinggi, yaitu Walikota, yang memiliki target jangka panjang selama lima tahun. Target ini dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Dalam RPJMD ini, berbagai indikator kinerja diidentifikasi sebagai prioritas yang harus dicapai, termasuk peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Selain itu, Walikota juga menetapkan target penurunan kemiskinan dan pengangguran sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- b. Ketersediaan sumber daya manusia yang mumpuni pada lintas sektor organisasi perangkat daerah, khususnya pada tim pelaksana SPBE dan pada Dinas Diskominfo dan Informatika Kota Tegal.

Dibuktikan dengan

- c. Ketersediaan Infrastruktur atau jaringan internet yang sudah memadai antar lintas sektor OPD sampai ke kelurahan hingga puskesmas dan ruang terbuka publik seperti taman alun-alun.

Dibuktikan dengan Target rencana Kota Tegal pada layanan SPBE pada tahun 2023 adalah memprioritaskan perluasan pemanfaatan tanda

tangan elektronik sampai ke unit terkecil seperti kelurahan. Dapat dilihat dari Kota Tegal yang sudah memiliki jaringan intra sampai ke kelurahan dimana menaungi 27 kelurahan, 4 kecamatan, dan 26 kantor dinas, karena pada dasarnya ruang wilayah Kota Tegal yang termasuk kecil dan kemampuan yang mumpuni dalam segi keuangan membuat kota tegal dapat membangun jaringan intra yang mampu menjangkau lintas sektoral organisasi perangkat daerah sampai ke tahap kelurahan hingga pada puskesmas. Pada aspek aksesibilitas internet dalam wilayah Kota Tegal sudah tersedia 4G sehingga memudahkan akses internet bagi masyarakat yang terbukti sudah tersedianya akses internet pada ruang terbuka publik seperti pada taman alun-alun.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa dalam indikator infrastruktur teknologi informasi Kota Tegal sudah cukup unggul. Namun demikian Pemerintah Kota Tegal tidak puas sampai disini sehingga berupaya untuk terus meningkatkan nilai indeks pada sistem pemerintahan berbasis elektronik di tahun 2024 untuk memperoleh predikat unggul dengan terus melakukan perbaikan dan rencana strategis apa saja domain dalam SPBE yang masih menjadi kekhawatiran dan fokus untuk terus ditingkatkan seperti pada domain manajemen dan audit.

- d. Telah di selenggarakannya rapat sosialisasi berkala yang dihadiri oleh tim pelaksana SPBE.

Dibuktikan dengan Mekanisme penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terbagi menjadi penilaian mandiri dan penilaian

langsung dari pusat. Penilaian mandiri dilakukan oleh tim pelaksana secara penuh pada lingkup pemerintah daerah yang diupload pada *website* Kemenpan RB disertai dengan data dukung yang dibutuhkan. Hal ini diungkapkan oleh Fahmi selaku tim pelaksana SPBE :

“Sebelumnya mereka melakukan sosialisasi penilaian kemudian setelah itu kita akan memasukkan bukti dukung masing-masing indikator sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Kemenpan setelah dibuka biasanya dibulan Mei atau Juni dengan aplikasi yang namanya tolpan SPBE (Pemantauan dan Evaluasi SPBE)” (Wawancara dengan Fahmi pegawai Diskominfo selaku tim pelaksana SPBE Kota Tegal pada 26 April 2024).

Berdasarkan pernyataan diatas dengan demikian Sebelum memulai proses penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), langkah awal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tegal adalah sosialisasi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang proses penilaian, kriteria yang harus dipenuhi, dan pentingnya peran setiap OPD dalam mendukung kesuksesan penilaian tersebut. Dengan adanya sosialisasi ini, setiap OPD diharapkan dapat mempersiapkan diri secara optimal dan menyusun strategi yang tepat untuk memenuhi standar yang ditetapkan.

Setelah sosialisasi dilakukan maka langkah berikutnya adalah pengumpulan bukti dukung dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Bukti dukung ini sangat penting karena menjadi dasar penilaian atas implementasi SPBE di lingkungan pemerintah daerah. Setiap OPD bertanggung jawab untuk memastikan

bahwa bukti yang dikumpulkan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, mencakup berbagai aspek mulai dari kebijakan, aplikasi, hingga layanan yang berbasis elektronik. Pengumpulan bukti ini dilakukan dengan cermat dan sistematis, mengingat ketepatan dan kelengkapan data sangat berpengaruh terhadap hasil penilaian.

3.3.2 Kemampuan atau *Capacity*

- a. Ketersediaan (Komputer) pada setiap pegawai organisasi perangkat daerah.

Dibuktikan Selaras dengan pernyataan dari Fahmi yang menyatakan:

“Pada indikator khususnya di manajemen meskipun tahun ini sudah melakukan kita belajar dengan lembaga yang point manajemennya tinggi dalam hal ini kementerian pertanian, kemudian kita dapat inspirasi dan kita akan mengimplementasikan esensi yang sama dengan tools yang beda di tahun ini. Esensi dari penilaian SPBE kan ada kekurangan di perbaiki dan tidak sembarang membuat tools saja tetapi kita harus menyiapkan orangnya dan melatih, manajemen SPBE kan terdiri dari ada ajuan hostay, ajuan jaringan, ajuan hotspot, gangguan jaringan itu selama ini sudah kita lakukan artinya esensinya sudah berjalan makanya segala sesuatunya normal lancar tetapi manajemen SPBE menginginkan harus ada tools maka dari itu yang saya kejar esensi dan sedang berusaha sekali mengejar jadi yang keluar ya itu sejatinya ada dulu aplikasinya belakangan isinya untuk mempersiapkan itu tidak mungkin waktu yang sebentar 1 atau 2 bulan bisa berbulan-bulan.” (Wawancara dengan Fahmi selaku pegawai Diskominfo bagian e-gov pada 5 April 2024)

Berdasarkan dari pernyataan – pernyataan diatas yang disampaikan oleh pegawai organisasi perangkat daerah yang turut berkoordinasi dalam implementasi dan pengawasan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kota Tegal dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa kelemahan yang masih menjadi hambatan dalam implementasi SPBE adalah dari sisi

jaringan internet sudah sangat memadai namun dalam SPBE tetapi pada domain manajemen SPBE menginginkan harus terdapat tools, oleh karena itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tegal dan tim pelaksana SPBE masih terus berupaya untuk meningkatkan hal itu.

- b. Keahlian SDM yang sudah mumpuni terutama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tegal, meskipun pada OPD yang lain masih memerlukan pelatihan dan Pendidikan untuk menunjang kemampuan pada sisi SDM.

Dibuktikan dengan Selaras dengan pernyataan dari Heru yang menyatakan:

“Untuk pemenuhan infrastruktur IT sudah baik, lalu dari kebijakan juga sudah mulai dijalankan walaupun belum semuanya misalkan pada manajemen resiko masih tertinggal, sehingga masih perlahan berproses belum semuanya baik. Setiap domain ada bobotnya masing-masing karena perhitungannya berbeda.” (Wawancara dengan Heru selaku pegawai Bappeda 26 April 2024)

Berdasarkan dari pernyataan – pernyataan diatas yang disampaikan oleh pegawai organisasi perangkat daerah yang turut berkoordinasi dalam implementasi dan pengawasan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kota Tegal dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa kekuatan SPBE yang menjadi dukungan untuk dapat ditingkatkan

3.3.3 Manfaat atau *Value*

- a. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Tegal membawa banyak manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan pemerintahan. Salah satu manfaat utamanya adalah peningkatan efisiensi

birokrasi. Dengan adanya digitalisasi dalam pengelolaan administrasi dan pelayanan publik, waktu yang dibutuhkan untuk memproses berbagai layanan menjadi lebih singkat dan praktis. Layanan yang sebelumnya memerlukan dokumen fisik dan tatap muka, kini dapat dilakukan secara daring, sehingga mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah.

- b. Selain itu, SPBE juga memperkuat transparansi dalam pengelolaan pemerintahan. Setiap proses administrasi, mulai dari perizinan hingga pengelolaan anggaran, dapat diakses dan dipantau secara *real-time* melalui platform digital. Hal ini mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dan korupsi, serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat. Dengan sistem yang terintegrasi, publik dapat lebih mudah memantau perkembangan kebijakan dan pengeluaran anggaran secara terbuka.
- c. Manfaat lainnya adalah peningkatan kualitas layanan publik. Dengan adanya SPBE, pelayanan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Misalnya, masyarakat dapat mengajukan permohonan atau keluhan secara online tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan. Hal ini tidak hanya menghemat waktu dan biaya, tetapi juga mempercepat respons dari pihak terkait, yang dapat langsung memproses atau menindaklanjuti setiap permintaan secara lebih efisien.
- d. Di sisi lain, penerapan SPBE juga berkontribusi pada pengurangan biaya operasional. Digitalisasi layanan mengurangi kebutuhan atas dokumen

fisik dan penggunaan sumber daya manusia untuk pengelolaan administrasi manual. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya dengan lebih tepat, mengurangi inefisiensi, dan pada akhirnya menghemat anggaran yang bisa dialihkan untuk sektor lain yang lebih mendesak.

- e. Dengan demikian SPBE di Kota Tegal tidak hanya meningkatkan kinerja pemerintahan, tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan akses yang lebih mudah, transparan, dan akuntabel, kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat meningkat. Hal ini sejalan dengan visi Kota Tegal untuk menjadi kota yang lebih inovatif, adaptif, dan tanggap terhadap perkembangan teknologi demi kesejahteraan masyarakatnya.